



Buletin Parlementaria

Nomor 1059/I/VII/2019 • Juli 2019



4TH

Sektor Industri Minim Pengawasan

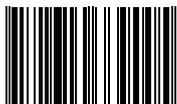
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL



5 Kerja Sama Militer
Indonesia - Tiongkok
Perlu Ditingkatkan



6 Honor Petugas Pemilu
Harus Meningkatkan



9 772614 339005

Sektor Industri Minim Pengawasan



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI berdialog dengan keluarga korban kebakaran pabrik korek gas PT. Kiat Unggul di Langkat, Sumut . Foto: Eko/HR

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meninjau lokasi pabrik korek api gas mancis PT. Kiat Unggul

yang terbakar di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai pengawasan Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap sektor industri dinilai kurang.

“Sangat disayangkan, kami turut berduka cita atas kejadian ini. Kunjungan ini sebagai bentuk konsen Komisi IX DPR RI untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bisa memperbaiki sistem pengawasan industri yang ada, termasuk industri rumahan seperti ini,” ungkap Putih saat memimpin Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau langsung lokasi pabrik korek api di Langkat, Sumut, Rabu (26/6).

Diketahui, beberapa waktu yang lalu, pabrik korek api gas mancis PT. Kiat Unggul mengalami kebakaran,

hingga mengakibatkan 30 orang tewas, terdiri dari 25 pekerja yang semuanya perempuan dan 5 anak-anak. Sementara 4 pekerja lain selamat karena meninggalkan pabrik untuk makan siang. Industri perakitan korek gas milik Indrawan ini tidak mengantongi izin usaha, dan mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan karyawannya.

Sebenarnya perusahaan induk milik Indrawan di Medan Sunggal memiliki izin usaha. Namun, untuk cabang perusahaan di Desa Sambirejo, Desa Perdamaian, dan Desa Banyu Emas di Langkat, tidak mengantongi izin. Sementara untuk korban lain, statusnya pekerja harian lepas. Atas peristiwa ini Kepolisian telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Indrawan (pemilik pabrik), Burhan (Manajer Operasional), dan Lisma (Manager Personalia)

Komisi IX DPR RI juga memberikan perhatian serius terkait kelalaian dalam pengawasan dan penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, soal perizinan industri juga bermasalah. Pengawasan industri juga menyisir industri yang tidak berizin dan industri yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menurut Putih, ini menjadi penting karena apapun jenis pekerjaannya memiliki risiko dan sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan kerja, sehingga perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan. Putih berharap peristiwa yang sangat memilukan ini tidak terulang lagi, baik di Langkat maupun di lokasi lainnya di Tanah Air. Ia juga meminta pihak kepolisian serta Pemkab Langkat dan pihak terkait, dapat mengusut tuntas kasus ini.

“Saya harap Pemkab Langkat dapat memberikan bantuan serta melakukan pemeriksaan perizinan terhadap semua pabrik di Langkat, agar tidak ada lagi pabrik yang ilegal, maupun yang tidak memiliki standar keamanan dan keselamatan sesuai aturan yang berlaku beroperasi di Langkat,” papar politisi Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyayangkan untuk cabang perusahaan yang tidak mengantongi izin, ia pun mempertanyakan peran dari pemerintah setempat. “Usaha ini sudah berjalan sembilan tahun. Gimana Pak Bupati ini perizinannya kok dikelabui gitu. Camatnya bagaimana, aturan keselamatan kerja juga diabaikan,” keluh politisi PDI-Perjuangan itu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 27 disebutkan, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, wajib memberikan hak pekerja sesuai aturan tersebut.

“Kalau ini tidak diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaannya wajib bayar sejumlah aturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Imam. ■ eko/sf

Filosofi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Langkah Awal Benahi Dikdasmen Berkeadilan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan filosofi yang menjadi pijakan dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 sudah benar adanya. Menurutnya, Permendikbud tersebut layak sebagai langkah awal bagi perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) guna mewujudkan keadilan untuk semua anak didik.

Meski demikian, Bamsuet, sapaan akrabnya, juga setuju dengan pernyataan penerapan Permendikbud itu pada tahun ini masih memerlukan evaluasi, karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Di sisi lain ia tetap berharap agar pemerintah konsisten menerapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi itu.



Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo.
Foto: Odjie/OD

“Dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil,” tandasnya.

Menurutnya, kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa-siswi yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggi harus diakomodasi oleh negara. Oleh karenanya negara harus bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi demikian.

“Yang terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan. Karena itu, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Mendikbud Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan,” tegas Bamsuet. ■ **dep/es**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Arnanda P., S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimban, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah, Geraldi Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

Jalur Sutra Modern Menghubungkan Masyarakat Global

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyambut baik proyek Jalur Sutra Modern yang dijalankan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI). Menurutnya, BRI dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan konektivitas antar masyarakat yang dilalui jalur tersebut. Proyek ini mampu menghubungkan masyarakat global.

Demikian mengemuka dalam kunjungan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan beserta delegasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6). Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira, Sekretaris

Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti.

“Kami selaku pimpinan, menyambut baik *Belt and Road Initiative* (BRI). Konsep ini hadir untuk saling menguatkan dan mensejahterakan masyarakat global,” paparnya. Politisi F-PDI Perjuangan ini mengatakan hubungan diplomatik kedua negara telah berlangsung lama dan saling menguntungkan. Ia juga mendorong hubungan antarparlemen kedua negara perlu ditingkatkan lagi.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap proyek tersebut, Utut mendorong dibentuknya *task force* atau gugus tugas. Gugus tugas yang akan dibentuk dari tim ahli ekonomi, perdagangan, dan infrastruktur ini akan mempelajari

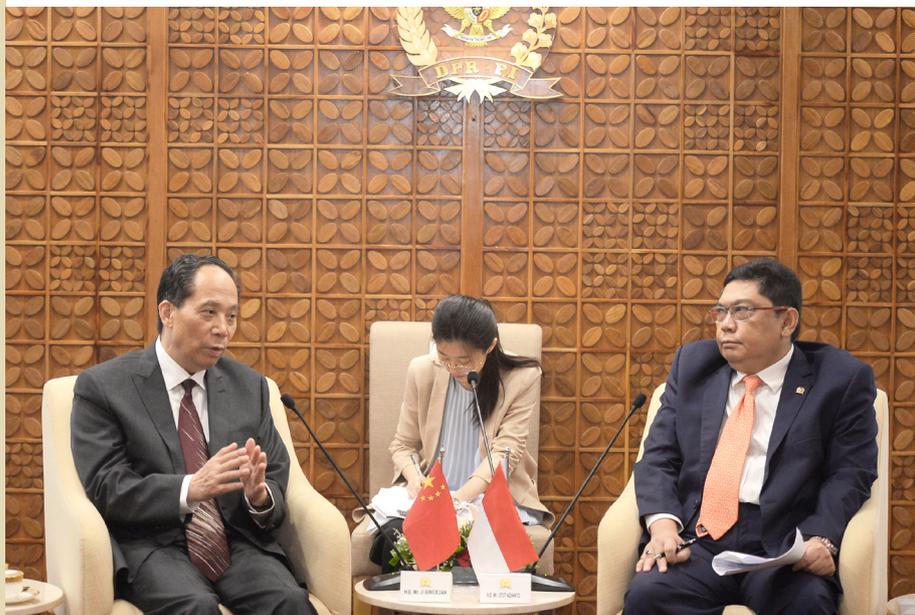
secara seksama Jalur Sutra Modern sehingga nantinya bisa memberikan masukan kepada pemerintah. “Jalur Sutra Modern akan kita wujudkan untuk kemajuan kedua bangsa,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ji Bingxuan yang juga merangkap sebagai Ketua *China Association for International Understanding* (CAIU) menyampaikan Indonesia-RRT mempunyai ikatan sejarah peradaban yang panjang. Jalur sutra telah menjadi sarana dan memainkan peranan penting dalam proses akulturasi masyarakat di kawasan yang dilalui rute tersebut. Menurutnya, tak sedikit produk pertanian bahkan peradaban RRT yang juga hasil akulturasi, sekaligus menandai masuknya peradaban Islam.

Ia mengibaratkan jalur Sutra kuno merupakan pintu yang sudah terbuka, tinggal kembali membangun aktivitas perdagangan di jalur tersebut. Karena itu, lanjutnya, RRT optimis hadirnya Jalur Sutra Modern dapat menjadi sarana penghubung politik dan ekonomi antarnegara yang mendukung BRI, sehingga dapat menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bersama.

“BRI bukan hanya untuk Tiongkok, tetapi melalui pembangunan BRI bisa menyambungkan seluruh negara sehingga kita dapat saling belajar dan membangun bersama. Tujuannya membangun dunia lebih damai dan harmonis,” jelasnya sembari menambahkan setidaknya ada 160 negara yang telah mendukung pembangunan jalur sutra modern.

Untuk diketahui, BRI atau sebelumnya dikenal dengan *One Belt, One Road* (OBOR) merupakan strategi Pemerintah Tiongkok untuk menghidupkan kembali rute perdagangan kuno atau jalur sutra. Dengan memperkuat infrastruktur pendukung perdagangan di negara-negara yang dilalui, program diharapkan mampu membangun sistem perdagangan internasional yang terkoneksi. ■ ann/mh



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan. Foto: Andri/OD

Kerja Sama Militer Indonesia - Tiongkok Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menilai kerja sama antara Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bidang pertahanan dan militer masih kurang. Padahal, Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara besar di kawasan masing-masing.

“Kita mengagumi kemajuan Tiongkok sangat luar biasa. Tetapi ada satu yang menjadi pertanyaan saya, kerja sama di bidang militer masih kurang bahkan boleh dikatakan belum ada,” papar Asril di sela-sela Kunjungan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan beserta delegasi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (21/6).

Ia menuturkan, selama ini kerja sama di bidang militer selalu berkiblat pada negara Barat. Padahal, sejarah mencatat Vietnam pernah mengalahkan militer Amerika dalam Perang Vietnam. “Orientasi kita ke negara Barat yang kita pikir lebih maju. Nah, kita melihat Cina telah menjadi salah satu negara super-power dunia, kenapa tidak kita mencari tahu juga teknik dan taktik bertempurnya. Itu yang saya rasa sangat kurang selama ini,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia mendorong ke depannya, Indonesia - Tiongkok terus membangun komunikasi dan persahabatan, guna terjalannya kerjasama pertahanan dan militer atas dasar saling percaya dan tetap menghargai

”

**KITA MELIHAT
CINA TELAH
MENJADI SALAH
SATU NEGARA
SUPER-POWER
DUNIA, KENAPA
TIDAK KITA
MENCARI TAHU
JUGA TEKNIK
DAN TAKTIK
BERTEMPURNYA.**

kedaulatan masing-masing. Apalagi, kedua negara adalah salah satu negara besar di kawasan sehingga dinilai mampu menjaga stabilitas kawasan, seperti di Laut Cina Selatan.

Senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan, ia berharap kerjasama dan komunikasi militer kedua negara bisa segera dibuka. “Saya akan menyampaikan saran ini kepada pihak militer Tiongkok. Saya juga mengajak Duta Besar RRT untuk Indonesia agar mendukung dan memberikan bantuan terkait usulan ini,” imbuhnya.

Selain membahas pertahanan, pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto ini juga membahas perkembangan Jalur Sutra Modern yang dijalankan RRT melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI). Diyakini, BRI dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang yang dilalui jalur tersebut. ■ ann/es



Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Asril Hamzah Tanjung. Foto: Andri/OD



Anggota
Komisi II DPR RI
Azikin Solthan.
Foto: Ojji/OD

Honor Petugas Pemilu Harus Meningkatkan

Azikin penting, mengingat dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 mendatang.

“Petugas Pemilu yang lalu hanya mendapat honor Rp 500 ribu, sementara dia harus bekerja 24 jam lebih. Kami tekankan hal ini jangan terulang lagi,” tegas Azikin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekjen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan, lebih baik penyelenggara Pemilu, khususnya KPU menghemat anggaran dengan menghapus berbagai kegiatan yang

tidak ada relevansinya. Misalnya, acara lomba lari KPU Run maupun konser KPU. Jauh lebih penting, tegas Azikin, dengan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan honor untuk penyelenggara Pemilu pada Pemilu yang akan datang.

“Semua kegiatan yang tidak mempunyai relevansi yang kuat dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti konser biduan yang mahal dan KPU Run tidak perlu untuk dilakukan. Lebih baik, anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan honor demi peningkatan kesejahteraan penyelenggara Pemilu,” tandas Azikin.

Ia menyoroti peralihan anggaran DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri. Azikin memberikan *warning* kepada DKPP agar independensi DKPP betul-betul dipelihara. “Kemendagri adalah struktur bagian dari pemerintahan eksekutif. Sehingga, kami mengimbau agar DKPP dalam proses melaksanakan tugas-tugasnya tidak terjadi intervensi yang tidak diinginkan oleh semua pihak,” tutur Azikin. ■ pun/sf

Anggaran Kemenkop UKM Naik 1,13 Persen

Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk tahun anggaran 2020 naik sebesar 1,13 persen dari tahun 2019. Dalam pagu indikatif tahun 2020, anggaran Kemenkop UKM mencapai Rp 972,3 miliar. Sebelumnya, pada 2019 anggaran Kemenkop UKM sebesar Rp 961,4 miliar.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto itu secara khusus beragendakan pembahasan anggaran Kemenkop UKM tahun 2020.

Saat yang sama Komisi VI DPR RI juga membahas anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi-Komisi perlu mengadakan pembicaraan pendahuluan terhadap Rancangan APBN yang meliputi RKA K/L dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan Anggota mengenai pembangunan daerah pemilihan bersama Pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR,” kata Dito saat membuka rapat.

Waktu pembahasan anggaran tahun 2020, lanjut Dito, seperti diserukan Banggar DPR RI adalah tanggal 12-21 Juni 2019. Khusus mengenai anggaran Kemenkop UKM, besaran anggaran yang telah disampaikan itu ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenkop UKM, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, dukungan manajemen, penguatan kelembagaan koperasi,

dan peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro.

Dalam rapat itu, Menkop UKM AAGN Puspayoga menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 270,4 miliar. Tambahan anggaran itu diantaranya untuk peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, sekaligus untuk penguatan kelembagaan koperasi. ■ mh/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Arief/OD

2020 Ditargetkan Ada Tiga Lapas Dengan Pengamanan Maksimal



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto: Eko/OD

Komisi III DPR RI dengan Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 di setiap Indonesia bagian timur, tengah, dan barat setidaknya memiliki satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan pengamanan maksimal (*maximum security*). Dengan tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyampaikan dukungannya kepada Kementerian Hukum dan HAM yang merencanakan Lapas kelas II A Manado akan menjadi bagian dari lapas *maximum security*.

“Kita mau di setiap Indonesia bagian barat, tengah, timur itu paling tidak ada minimal satu yang difokuskan (lapas *maximum security*) untuk khusus misalnya bandar narkoba, gembong terorisme, kita berharap paling tidak ada tiga lapas

dengan *maximum security* baru di tahun ini. Paling tidak dimulai dari tahun 2020,” jelas Erma usai meninjau Lapas Kelas II A Manado, Sulawesi Utara, Jumat (21/6).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan dengan *maximum security* dibutuhkan SDM yang mumpuni. Erma mengatakan sipir yang ditugaskan menjaga harus dididik secara khusus dengan penguasaan sistem keamanan yang bagus. “Dibutuhkan kesiapan SDM, karena tidak bisa dan enggak bisa sembarangan dari sipir yang tidak memiliki kapasitas untuk menjaga lapas *maximum security*,” tandasnya.

Setelah Tim Kunspek Komisi III DPR RI melihat langsung Lapas Manado, Erma mengungkapkan, lapas tersebut

”

...KHUSUS MISALNYA BANDAR NARKOBA, GEMBONG TERORISME, KITA BERHARAP PALING TIDAK ADA TIGA LAPAS DENGAN *MAXIMUM SECURITY* BARU DI TAHUN INI.

bagian dari perencanaan untuk menjadi lapas *maximum security*, maka kedepan akan banyak perubahan-perubahan pada lapas tersebut. Saat ini di DPR RI sedang dilakukan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2020, jadi diharapkan Lapas Manado termasuk yang diberi perhatian untuk dilakukan perbaikan.

“Kita mengecek kondisi ruang-ruang tahanan, sistem pencahayaan bagus, sirkulasi udara untuk warga binaan juga bagus. Namun ada catatan, masih ada banjir, kita sedang pikirkan bagaimana caranya, sekarang ini sedang dilakukan penataan lapas. Rapat dengan Menkumham pada minggu depan mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk perbaikan kedepannya,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat itu. ■ eko/es

Komisi IV Apresiasi Capaian WTP Kementerian LHK

Komisi IV DPR RI mengapresiasi pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kementerian LHK juga diminta agar capaian tersebut dipertahankan pada tahun 2019.

“Kami mengapresiasi pencapaian WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun Anggaran 2018. Selain itu kami juga meminta

KLHK untuk memperbesar serapan anggaran tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kinerja, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi saat memimpin rapat kerja dengan Menteri LHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6)

Pada kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI juga menerima laporan atas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Sementara (Hapsem) BPK Semester II Tahun 2018. Ia minta Kementerian LHK untuk segera menyelesaikan

keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan atas realisasi APBN KLHK Tahun 2019. Sampai dengan 19 Juni 2019 sudah terealisasi anggaran sebesar Rp 2,53 triliun atau 27,88 persen dari Pagu APBN Tahun 2019 sebesar Rp 9,076 triliun. Komisi IV DPR RI berpesan agar KLHK memprioritaskan penyelesaian program-program kerakyatan, guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan. ■ [ayu/es](#)



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi dan Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono. Foto: Arieti/OD

Komisi V Salurkan Bantuan Perumahan BSPS

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya berupa perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima langsung oleh perwakilan kepala desa dari kedua kabupaten tersebut.

“Kami memberikan secara simbolis bantuan program kemasyarakatan dari Kementerian PUPR, berupa perumahan swadaya atau perumahan BSPS kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Program

ini dilaksanakan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian materi sebesar Rp. 17,5 juta per kepala keluarga,” ujar Fary saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI di Gedung Bupati Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/6).

Dengan adanya bantuan perumahan BSPS ini, Fary berharap agar masyarakat bisa bekerja secara gotong royong untuk memiliki rumah yang layak serta bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk lebih giat bekerja. Jika program ini berjalan dengan baik, tambah Fary, ke depannya kemungkinan kuotanya akan ditambah.

Selain itu Komisi V DPR RI juga menyerahkan secara simbolis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), khususnya program edukasi kepada para kelompok penerima air sebesar Rp. 195 juta kepada setiap kelompok.

“Kita sudah berikan ke Sumba Barat ada 20 kelompok, dan ke Sumba Barat Daya ada 10 kelompok. Setiap kelompok masing-masing menerima sebesar Rp 195 juta. Ini juga dikerjakan secara gotong royong dan kita harap setelah selesai, mereka pelihara, dan ujungnya kita harap ada peningkatan hasil panen dari Sumba Barat dan Sumba Barat Daya,” ujar Fary. ■ eno/es



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Foto: Kresno/OD

Komisi V Dorong Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berkomitmen mendorong pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang menjadi ide besar pemerintah daerah. Pasalnya, kawasan terpadu ini ditargetkan akan menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan dan bahkan Provinsi Riau.

“Saya meminta kepada mitra-mitra kerja Komisi V agar memiliki komitmen bersama dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah ini. Para mitra kerja mulai memikirkan dan segera diajukan supaya dibahas bersama kami anggarannya,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI meninjau kawasan Teknopolitan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (20/6).



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Teknopolitan Pelalawan di Riau. Foto: Jaka/OD



JALAN MENUJU KAWASAN TEKNOLOGI PELALAWAN DIJADIKAN JALAN NASIONAL, SEBAGAI JALAN ALTERNATIF UNTUK MEMPERPENDEK JARAK DAN MENGURAI KENDARAAN DI JALAN UTAMA KERINCI.

Ibnu menjelaskan, Teknopolitan Pelalawan menjadi kawasan terpadu, dimana terdapat Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), mencerdaskan sebagai sebuah tujuan nasional. Di kawasan ini terdapat pula pengembangan industri sawit, tentu saja menjadi bagian dari pengembangan ekonomi, tidak hanya kepentingan masyarakat lokal, tapi bangsa secara keseluruhan.

“Kontribusi Pelalawan kita anggap besar, sebab apa yang kita lakukan adalah bagian dari tugas mulia Anggota Komisi V DPR RI dan juga mitra-mitra Kerja Komisi V harus ikut serta berkontribusi bagi pengembangan wilayah Riau, khususnya di Kabupaten

Pelalawan,” terang politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, Ibnu juga mengusulkan agar jalan menuju kawasan Teknopolitan Pelalawan dijadikan jalan nasional, sebagai jalan alternatif untuk memperpendek jarak dan mengurai kendaraan di jalan utama Kerinci. Apalagi sampai saat ini masih digunakan jalur sungai untuk menuju kawasan teknopolitan.

“Menurut saya, sekalian saja nanti menjadi jalan nasional, apalagi kawasan *technopark* terpadu di dalamnya juga terdapat kawasan pariwisata. Dengan begitu pengembangan wilayah ini bisa didorong untuk program strategis nasional,” tandas legislator dapil Sulawesi Barat itu. ■jk/es

Komisi V Ajak Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Terdampak Banjir Konawe

Komisi V DPR RI memfasilitasi pertemuan pemerintah pusat yang dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Pemerintah Daerah Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara guna meninjau langsung sarana dan prasarana serta infrastruktur pasca banjir bandang yang melanda daerah tersebut.

“Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir bandang di Sulawesi Tenggara,” kata Anggota Komisi V

DPR RI Ridwan Bae ketika memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI ke Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan setelah melihat beberapa titik yang terdampak banjir tersebut, sejumlah rencana perbaikan kawasan sungai dan infrastruktur akan segera dilakukan oleh Menteri PUPR. “Kami sangat mengapresiasi rencana jangan pendek dan jangka panjang akan dilakukan Menteri PUPR, kami akan kawal terus ini,” tegasnya.

Namun untuk mengetahui pemicu dari banjir tersebut, legislator dapil Sulawesi Tenggara itu

meminta tujuh kementerian yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian untuk turun ke lokasi menganalisa penyebab banjir tersebut.

“Di sini ada aktivitas tambang, makanya dengan turunnya tujuh kementerian secara bersama-sama diharapkan dapat mengatasi permasalahan serta membantu pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Sebab salah satu penyebab banjir adalah kerusakan alam,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kunjungan ini untuk melihat, merespon dan menangani secara langsung daerah yang terdampak banjir. “Kami sudah melihat kondisi pasca banjir ini mulai dari Kendari sampai di Bendungan Wawotobi. Ada beberapa hal mengenai banjir yang bisa kita tangani. Untuk jangka pendek kita akan membuat tanggul-tanggul khusus di daerah pemukiman,” jelasnya.

“Kemudian, kami juga akan merlebarkan Jembatan Ameroro yang lebih kecil dari Bendungan Wawotobi. Sehingga ruang basah sungainya tidak tercekik seperti sekarang ini. Mudah-mudahan tahun ini kita tenderan secara langsung karena kerangkanya sudah ada dan akan segera kita tangani,” pungkasnya. ■ rnm/es



Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kunjungan Spesifik di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Foto: Ria/OD

Subsidi Migas Haruslah Tertutup



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Makassar. Foto: Chasbi/OD

Komisi VII DPR RI menginginkan sejak lama subsidi minyak dan gas dilakukan secara tertutup.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, subsidi yang baik bukanlah subsidi harga, melainkan subsidi yang sifatnya tertutup. Jika subsidi harga diberlakukan, maka kan terjadi disparitas harga, kemudian muncul kesempatan orang melakukan kecurangan. Ia menginginkan subsidi tertutup diberlakukan di setiap daerah.

“Sebetulnya kartu pemerintahan sekarang itu adalah subsidi, mestinya itu bisa dilakukan secara menyeluruh. Pernah ada *pilot project* di Tarakan, tetapi itu gagal dengan alasan sinyal

dan listrik sering padam. Nanti di Jakarta kami akan menggelar rapat terkait evaluasi dari subsidi migas ini,” kata Gus Irawan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. Pertamina dan direksi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam pertemuan turut dibahas mengenai jaringan gas (jargas) dan Elpiji 3 kilogram. Secara umum, harga Elpiji tidak menjadi masalah. Jika terjadi kelangkaan, pasti menyebabkan harga menjadi tinggi. Berdasarkan paparan, harga elpiji di

bawah Rp 20 ribu per tabung. Ini masih baik dibandingkan beberapa daerah lain. Mungkin saja daerah lain mendapat alokasi yang tidak sebanding sehingga terjadi perbedaan harga.

“Dari apa yang dipaparkan, sekaligus kunjungan lapangan ke agen PT. Aneka Mitra Gas, kami menilai harga elpiji di Makassar masih baik. Tetapi saat hari-hari tertentu memang mengalami perubahan harga, misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di beberapa daerah lain seperti di Sumatera Utara, kerap kali sampai Rp 33 ribu per tabung. Dari jumlah 488.000 MT, mungkin itu sudah suatu kuota yang cukup,” tandas legislator dapil Sumut itu. ■ cas/sf

Perlu Keseimbangan Perusahaan BUMN dengan Swasta

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta pemerintah menyeimbangkan serapan pasar antara perusahaan di bawah naungan BUMN dengan perusahaan swasta. Menurut Ridwan, keseimbangan itu penting terutama untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Diketahui saat ini perusahaan BUMN sudah menguasai pasar dalam negeri hingga lebih dari 50 persen, tentu saja perusahaan swasta merasa dirugikan.

"Dengan adanya kebijakan sinergi BUMN, sehingga proyek-proyek pemerintah memakai produk-produk BUMN juga. Ini perlu menjadi perhatian, pemerintah juga perlu memperhatikan

perusahaan swasta, karena jika perusahaan swasta turun bisa mengakibatkan ekonomi kita goyang," ungkap Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Pabrik Semen Besowa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, ekonomi yang ideal seharusnya roda perekonomian sepertiga dijalankan oleh negara (BUMN) serta selebihnya dikelola oleh swasta. Karena negara harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian. "Jangan BUMN menjadi lokomotif sekaligus juga menjadi gerbongnya, yang seharusnya gerbongnya menjadi milik rakyat (swasta)," tambah Ridwan. Legislator dapil Jawa Timur V ini

mencontohkan penggunaan semen pada proyek infrastruktur, dimana pemerintah menggunakan semen di bawah naungan BUMN. Mengambil sinergi BUMN berdampak positif, namun tanpa harus mengesampingkan pihak swasta yang selama ini menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan PT. Semen Besowa Subhan Aksa Mahmud menyampaikan bahwa Pabrik Semen Bosowa memiliki kapasitas produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun. Produksi semen menurutnya sudah *Over supply* sekitar 35 persen tahun ke tahun dari serapan produksi.

Subhan Aksa juga berharap perlunya sektor transportasi yang mumpuni seperti ketersediaan kapal internasional. Contohnya di Vietnam dan Singapura yang mempunyai cost pengangkutan lebih murah dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka yang lebih rendah.

"Tentunya di bagian cost yang selama ini menghambat Kapal Cargo Indonesia, yaitu keterbatasan harga BBM, Jumlah *quantity* ekspor, sektor pelabuhan dan lainnya," pungkasnya.

■ skr/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Pabrik Semen Bosowa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Singgih/OD

Sedimentasi Waduk Bili-Bili Harus Segera Ditangani



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung memimpin Tim Kunspek Komisi VII meninjau PLTA Bili-Bili, Gowa, Sulsel.
Foto: Hendra/OD

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyoroti sedimentasi yang terjadi di Waduk Bili-Bili, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera ditangani. Hal ini agar kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bili-Bili dalam menghasilkan listrik kembali maksimal. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi, karena pasokan listrik di Sulsel mengalami surplus.

“Pada dasarnya listrik di Sulsel surplus. Saya kira kontribusi PLTA Bili-Bili termasuk di dalamnya, cuma Bili-Bili ini belum beroperasi secara penuh semuanya karena adanya sedimentasi. Kuota listrik yang diberikan itu tidak penuh. Kita menyaksikan bahwa turbinnya itu tidak jalan bersamaan, tapi bergantian,” ujar Tamsil saat memimpin Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau PLTA Bili-Bili, Gowa, Sulsel, Sabtu (22/6).

Permasalahan sedimentasi ini menjadi topik yang dibahas dalam Kunspek tersebut. Tamsil menambahkan, Komisi VII DPR RI berharap permasalahan ini perlu segera ditangani secara maksimal. Bahkan, penguatan anggaran pun siap dilakukan oleh Komisi VII DPR RI manakala dalam penyelesaiannya membutuhkan tambahan anggaran.

“Permasalahan yang dikeluhkan soal sedimentasi. Karena itu kita harus sama-sama mengatasi supaya PLTA yang ada di sini bisa berjalan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kelistrikan di Sulsel dan juga memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Tamsil.

Legislator dapil Sulsel ini mensinyalir sedimentasi yang terjadi ini disebabkan oleh longsor dan penambang liar. Bahkan penambang berizin juga berkontribusi pada pembentukan sedimentasi di Waduk Bili-Bili. Karena ini ia mengapresiasi langkah Pemprov yang telah punya rencana untuk menghentikan kegiatan penambangan yang ada di wilayah sekitarnya.

“Bahkan penambangan di sini harus dihentikan total. Saya dengar dari Gubernur Sulsel sudah tidak mengizinkan penambangan. Dari kabupaten sudah tidak ada rekomendasi penambangan. Karena izin dikeluarkan setelah ada rekomendasi dari kabupaten,” ujar Tamsil.

Politisi PKS ini berharap kontribusi listrik di Sulsel bisa mencapai titik maksimal. Melalui politik anggaran, Komisi VII DPR RI siap mengawal proses penanganan sedimentasi agar listrik di Sulsel bisa mencapai titik maksimal dan didistribusikan ke wilayah Sulawesi pada umumnya.

“Kita mendorong penganggaran. Saya kira semua harus berkomitmen penganggaran di tingkat nasional dan daerah harus menjaga ini. Masyarakat harus didorong untuk tidak melakukan langkah yang bisa meningkatkan sedimentasi,” pesan Tamsil.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT. PLN Samsul Huda yang turut hadir dalam kesempatan ini memberikan apresiasi atas langkah dan perhatian Komisi VII DPR RI terhadap kondisi kelistrikan di Sulsel. Sehingga diharapkan sinergi yang baik ini dapat memberikan hasil positif untuk kinerja PLN ke depannya. ■ hs/sf

Anggaran Kemenag Naik, Komisi VIII Pertanyakan Pemerataan Kualitas Pendidikan Agama

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Agama beserta jajarannya dengan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, selama dua pekan terakhir. Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan tambahan sebesar Rp 6,1 triliun, atas Pagu Indikatif Kemenag sebesar Rp 65,2 triliun untuk TA 2020. Anggaran Kemenag naik secara signifikan dari Rp 62 triliun pada tahun 2019 lalu.

Usulan anggaran TA 2020 dengan total Rp 71,3 triliun ini didominasi untuk dua mata anggaran, yaitu Program Bimbingan Masyarakat Agama dengan dan paling besar untuk Program Pendidikan Islam yang mencapai 80 persen, naik 6,28 persen dari alokasi tahun lalu. Meski terjadi kenaikan, Ali Taher menilai sebaran anggaran harus merata di berbagai lapisan pendidikan yang diselenggarakan baik pemerintah, maupun swasta.

“Misalnya pada Pendidikan Islam, pesantren dan madrasah kita itu jumlahnya lebih dari 90.000. Sementara yang baru bisa terakreditasi hanya 53.000, sisanya belum. Ini akan berdampak pada tidak meratanya pelayanan publik termasuk kualitas tenaga sumber daya manusia, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana

dan prasarana pendidikan,” tandas Politisi F-PAN ini usai memimpin Raker dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Ali Taher juga menilai tambahan anggaran belum cukup untuk bisa menjalankan pendidikan yang berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, problematika pendidikan agama di Indonesia sangat bervariasi. “Kota besar tentu berbeda dengan kota kecil. Jangankan swasta, Pemerintah saja punya klaster A, B, dan C. Madrasah Aliyah Negeri juga ada klaster A, B, C. Sebaran anggaran tidak merata inilah yang nantinya mengganggu proses

pendidikan,” tambah legislator dapil Banten ini.

Zonasi, menjadi sistem yang diharapkan untuk turut meningkatkan meratanya kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Ali berharap dengan adanya sistem zonasi, makas seluruh prospek pendidikan dapat meningkat secara merata di tanah air. “Zonasi itu kan tujuannya meningkatkan kualitas dan juga memunculkan peran serta masyarakat dan mutu yang secara seimbang,” jelasnya. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap besaran usulan tambahan dan Pagu Indikatif Kemenag RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020.

■ alw/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong. Foto: Azka/OD

BPJS Ketenagakerjaan Diharap Tingkatkan **Kepesertaan** dari ASN dan PPPK

Berkeenan dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada ranah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Komisi IX Mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan capaian kepesertaan yang saat ini baru mencapai 56,03 persen dari potensi tenaga kerja Indonesia 90,9 juta.

“Ditambah dengan kepesertaan ASN dan PPPK, sehingga tenaga kerja yang belum menjadi peserta di lingkungan instansi pemerintahan,

”

SELAIN ASN DAN PPPK YANG SUDAH DIJABARKAN DI ATAS, KOMISI IX JUGA DIMINTA UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN SECARA SERIUS PADA KEPESERTAAN KHUSUSNYA PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PELAUT AWAK KAPAL, PELAUT PERIKANAN, DAN NELAYAN.



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Effendi memimpin RDP dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Andri/OO

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dapat terpenuhi,” papar Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M Effendi di ruang rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ini juga mendesak agar BPJS Ketenagakerjaan mengatasi masalah disharmonisasi regulasi kepesertaan di berbagai kementerian dan lembaga Negara. BPJS Ketenagakerjaan juga dituntut agar berperan aktif dalam berkoordinasi

dengan beberapa kementerian dan lembaga Negara.

Komisi IX DPR RI mengarahkan agar BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN.

Selain ASN dan PPPK, Komisi IX DPR RI juga meminta untuk memberikan perhatian secara serius pada kepesertaan, khususnya pemberian jaminan sosial bagi pelaut awak kapal, pelaut perikanan, dan nelayan. ■ eko/es

PPDB Zonasi Dinilai Baik, Tapi Terlalu Terburu-buru

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai hadirnya kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis

zonasi terlalu terburu-buru.

“Salah satu penyebab terjadinya masalah di tengah masyarakat karena munculnya Permendikbud yang dinilai mendadak, sehingga kurang sosialisasi kepada pemerintah daerah, pelaksana dan masyarakat,” jelas Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Fikri menilai, jika dilihat dari tujuannya zonasi memang baik, karena untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit di tengah masyarakat. “Jadi tujuannya itu membuat akses pendidikan jadi merata. Sistem ini diyakini akan menghilangkan stigma sekaligus diskriminasi dalam pendidikan,” tuturnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tujuan dari penerapan zonasi ini bagus. Namun jika sarana prasana pendidikan dan persebaran guru belum merata,

penerapan zonasi akan sulit diterima masyarakat.

“Jadi, benahi dulu ini sampai ke masyarakat, kalau pelayanan pendidikan di Indonesia semuanya sudah sama. Dan kalau peserta didik dibuat sistem zonasi, guru juga *dong* buat sistem zonasi. jadi tidak menumpuk,” saran legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Selain itu, yang menyebabkan terjadinya problematika di daerah karena tata kelola daerah yang berbeda. Di Solo misalnya, tata kelola di sana dibagi ada zona pemerintahan, zona perdagangan dan zona pendidikan. “Jadi penerapan sistem zonasi ini akan beririsan dengan tata kelola daerah yang seperti ini. Seperti ini yang perlu dipikirkan juga,” tutupnya.

■ alw/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Foto: Andri/OD

BTN Didesak Selesaikan Kasus Temuan BPK

Menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam proyek perumahan yang dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN), Komisi XI DPR RI medesak agar temuan itu segera diselesaikan dengan baik. Kinerja keuangan BTN juga diimbau untuk dibenahi.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, terungkap setidaknya ada 22 temuan penyimpangan dalam pengelolaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada tahun 2017. Kepada Komisi XI DPR, Dirut BTN Maryono menyampaikan, dari 22 kasus hasil audit BPK, baru 15 kasus yang diselesaikan. Tujuh kasus sisanya hingga kini belum terselesaikan.

“Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi PT. Bank BTN menyelesaikan

”

JUMLAHNYA 38 KASUS DAN BARU DISELESAIKAN 29 KASUS.

temuan hasil Badan Pemeriksa Keuangan yang masih dalam proses penyelesaian,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6). Marwan menambahkan, “BTN juga harus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.”

Di antara temuan kasus itu adalah proyek perumahan di Manado, Sulawesi Utara dan banyaknya kredit

macet. Selain itu, ada pula kasus pengelolaan KUR BTN tahun 2012, 2013, dan Semester I 2014 yang bermasalah. Jumlahnya 38 kasus dan baru diselesaikan 29 kasus. Belum lagi, banyak ribuan rumah bersubsidi tak dihuni pemiliknya lantaran kualitas rumahnya yang kurang layak, terutama akses ketersediaan air bersih dan listrik.

■ alw/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan. Foto: Andri/OD

Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat

Letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) atau lempengan tektonik yang tidak stabil, membuat Indonesia sering mengalami bencana letusan gunung api, gempa dan tsunami. Kendati demikian, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno, *people awareness* atau budaya sadar bencana baik di tataran masyarakat maupun pemerintah masih sangat rendah.

“Sikap ini belum menjadi perilaku sehari-hari masyarakat. Dengan adanya pencegahan atau mitigasi yang kuat maka akan terbentuk *people awareness* yang tinggi,” kata Sudiro saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI untuk menjarung masukan terkait penyusunan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/6).

Untuk membangun budaya sadar bencana, menurut Sudiro, aspek pencegahan menjadi penting untuk ditekankan dalam revisi UU Penanggulangan Bencana, termasuk dukungan alokasi anggaran. Mengingat selama ini, penguatan anggaran hanya fokus pada penanggulangan bencana saja tidak ada dalam pencegahan. “Karena itu sebelum ke *people awareness* harus *government awareness* dulu, *parliament awareness* dulu tentang pencegahan, sehingga ada sinkronisasi,” sambung Sudiro.

Politisi F-Hanura ini menambahkan, nantinya mitigasi atau pencegahan atas bencana dapat dimulai dengan memasukan studi pencegahan serta penanggulangan bencana ke dalam kurikulum pendidikan. “Ada banyak cara bagaimana kita memberikan penekanan-penekanan tentang



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI menjarung masukan revisi UU Penanggulangan Bencana di Makassar, Sulsel. Foto: Anne/OD

pencegahan baik itu di perangkat aturan perundang-undangan maupun implementasi melalui pendidikan. Misalnya mulai dari kurikulum sekolah, jadi sejak dini anak-anak diedukasi tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi bencana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Maulana yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, bencana di Indonesia terjadi bahkan sebelum bencana itu datang, karena tidak adanya konsep pencegahan yang komprehensif. Ia menerangkan pencegahan atau mitigasi dapat dilakukan melalui pemetaan atau identifikasi resiko bencana serta meningkatkan *people awareness* terhadap kebencanaan.

Adi berharap, adanya revisi UU Penanggulangan Bencana ini dapat

fokus pada mitigasi juga, sehingga menjadi RUU Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Dengan berubahnya nomenklatur tersebut, maka peraturan teknis pun akan mengikuti.

“Bagaimana kita meningkatkan *people awareness* ini terlaksana, jika nama Undang-Undangnya diubah, menjadi UU Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Tidak ada kata terlambat, walaupun kita sudah sedikit terlambatnya sebenarnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, menangani bencana di Indonesia tidak bisa konvensional, sebab pada UU Nomor 24 Tahun 2007 belum melibatkan fungsi perguruan tinggi sebagai salah satu sumber IPTEK. Padahal, ada beberapa bencana seperti bencana hidrometeorologi yang bisa diprediksi dengan perangkat teknologi. ■ ann/sf

Sistem Kuota Rokok Bebas Cukai Harus Dihapus

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Pertembakauan Firman Soebagyo menyoroiti pemberlakuan sistem kuota produk rokok bebas cukai. Firman menyebut, hal tersebut justru memberikan peluang besarnya peredaran rokok ilegal. Maka, Firman mengimbau, sistem kuota tersebut dihapuskan dan diganti dengan penerapan cukai untuk seluruh produk tanpa terkecuali.

“Semakin besar kuota rokok yang mendapatkan pembebasan cukai, maka semakin besar peluang rokok ilegal untuk beredar. Kuota ini bisa menjadi *grey area*. Oleh karena itu, kalau sistem kuota bisa menimbulkan kerawanan, maka lebih baik kita menerapkan prinsip bahwa semua produk tanpa terkecuali harus dikenakan cukai,” ujar Firman, usai memimpin Kunjungan Kerja Pansus RUU Pertembakauan ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (24/6).

Politisi Partai Golkar itu optimis, jika hal itu diberlakukan, maka berdampak positif pada penerimaan negara. Lebih lanjut, upaya monitornya juga begitu mudah dilakukan karena jika ada rokok yang beredar tanpa cukai, maka dengan mudah bisa teridentifikasi bahwa rokok tersebut merupakan kategori produk ilegal.

“Jadi itu salah satu yang menjadi catatan kami dalam membuat aturan dasar hukum. Tentunya, ini semua akan tetap dengan dilakukan sinkronisasi terhadap UU yang sudah terlebih dulu ada. Sehingga, tidak ada tumpang tindih UU yang satu dengan yang lain. RUU ini betul-betul diupayakan memberikan sebuah solusi yang komprehensif,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal dan Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, berdasarkan penelitian KPK, ditemukan adanya kebocoran anggaran negara akibat kuota pembebasan cukai itu. “Dengan kuota pembebasan cukai, maka bagi yang masuk kuota ada kebijakan untuk tidak membayar cukai. Namun, berdasarkan penelitian KPK, ditemukan kebocoran di sektor itu,” tuturnya.

Nirwala menambahkan, terjadi disparitas rokok mencapai 62 persen antara yang membayar cukai dengan yang tidak membayar. Sehingga, setelah diteliti ulang, pihaknya dengan data terakhir menemukan bahwa rokok yang sudah terlanjur menggunakan fasilitas kuota

pembebasan cukai dan kemudian masuk ke Batam, ternyata jumlahnya cukup untuk menyuplai keperluan Batam selama enam bulan.

“Produk rokok yang sudah terlanjur masuk ke Batam dengan menggunakan fasilitas kuota pembebasan cukai ini, berdasarkan penemuan dengan data terakhir ternyata jumlahnya cukup mencengangkan. Jika ditotal, maka jumlahnya cukup untuk menyuplai keperluan Batam selama 6 bulan. Ini dapat diartikan bahwa kuota yang diberikan saat ini terlalu besar. Namun demikian, rekan kami di BP Batam mengklaim bahwa per tanggal 17 Mei 2019 sudah mencabut kuota pembebasan cukai tersebut,” tutup Nirwala. ■ pun/sf



Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Pertembakauan DPR RI mengunjungi PT Fantastik Internasional di Batam. Foto: Puntio/OD

Banyak Peristiwa Bencana Belum Diatur Dalam UU Penanggulangan Bencana

Letak geografis Indonesia yang berada pada cincin api (*Ring of Fire*) pasifik membuat Indonesia rentan akan bencana. Untuk itu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengingat masih banyak yang belum diatur dalam UU tersebut.

“Tujuan dilakukannya revisi, karena banyak peristiwa bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak ter-cover oleh UU Penanggulangan Bencana,” ungkap Wakil Ketua Baleg

DPR RI Totok Daryanto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan pihak terkait di Kantor Gubernur Papua Barat, Sorong, Provinsi Papua Barat (19/6).

Ditambahkan Totok, revisi UU Penanggulangan Bencana nantinya akan lebih fokus pada pencegahan. Pasalnya korban yang berjatuh dalam kebanyakan bukan karena faktor bencana, melainkan ketidakhahaman masyarakat terhadap karakter bencana.

“Kita lebih fokus kepada pencegahan. Mengapa? karena masyarakat banyak yang belum

memahami karakter bencana, sehingga timbul ketakutan, kepanikan, yang justru hal itulah yang banyak menimbulkan korban jiwa,” terang legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

UU Penanggulangan Bencana masih dianggap lemah terutama dalam mengatur koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan penanggulangan bencana antara kementerian atau lembaga, dan dinas di daerah. Aturan tentang penanggulangan bencana yang komprehensif dan jelas sangatlah dibutuhkan. ■ hr/es



Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto memimpin Tim Kunker Baleg DPR RI ke Sorong, Provinsi Papua Barat. Foto: Eka Hindra/OD

Indonesia- Iran Berkomitmen Merdekakan Palestina

Indonesia dan Iran sampai kini masih tetap berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina. Tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina selalu jadi perhatian kedua negara. Baik Indonesia maupun Iran tak memandang agama apapun yang dipeluk rakyat Palestina. Tapi, hak asasi manusia yang begitu masif dilanggar dan menimpa rakyat Palestina jadi perhatian yang terus disuarakan di forum-forum internasional.

Persoalan tersebut mengemuka saat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima tamu kehormatan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiolah Mohammadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). “Kedua negara berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina. Bukan karena mereka itu muslim, tapi karena mereka diperlakukan tanpa pemberlakuan hak asasi manusia,” tegasnya.

Kebetulan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sudah berkunjung ke Iran untuk menguatkan kembali komitmen ini dengan Presiden Iran. Karena begitu banyak tragedi kemanusiaan, kata Nurhayati di hadapan Dubes Iran, dunia saat ini butuh *leadership by example*, yaitu kepemimpinan dengan memberi ketauladanan.

“Di forum-forum internasional saya selalu sampaikan, ketika kita menolong orang tidak perlu kita menanyakan apa agamanya. Kita harus tolong dulu terlepas dari agama, ras, ataupun etnisnya,” tandas politisi Partai Demokrat ini usai pertemuan. Kepada Nurhayati, Dubes Iran juga menyampaikan keprihatinan atas



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima tamu kehormatan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiolah Mohammadi. Foto: Geraldi/OD

sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran. Namun, Nurhayati meyakinkan bahwa Iran pasti bisa segera mengatasi segalanya.

Nurhayati menambahkan, DPR RI akan menjadi tuan rumah *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3* di Bali, September 2019 mendatang. Dalam forum itu, ia menekankan agar dunia memberikan perhatian kepada perubahan iklim. Perubahan iklim ternyata lebih banyak menyita korban jiwa daripada aksi terorisme. Akibat perubahan iklim, banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

“Kami memberi penekanan, Indonesia punya dua pengalaman, yaitu perubahan iklim dan terorisme. Indonesia punya pengalaman

keduanya, baik perubahan iklim maupun terorisme yang harus dibagi kepada dunia. Kami ingin dunia menaruh komitmen kuat terhadap perubahan iklim ini, karena Indonesia punya pengalaman dengan perubahan iklim yang menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Korbannya jauh lebih banyak daripada terorisme,” imbuhnya.

Kunjungan Dubes Iran ini sekaligus juga ingin berpamitan, karena tugasnya di Indonesia segera berakhir. Namun, hubungan baik Indonesia-Iran tetap berlanjut dengan Dubes penggantinya nanti. “Dubes Iran ingin mengakhiri masa tugasnya dan berpamitan. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini dilakukan serta hubungan baiknya antara Parlemen Iran dan Indonesia,” tutup legislator dapil Jawa Timur V itu. ■ mh/sf

Peneliti DPR Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset



Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan jajaran LIPI foto bersama Muhammad Mulyadi, Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang dikukuhkan sebagai profesor. Foto: Andri/OD

Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dikukuhkan sebagai profesor riset bidang sosiologi politik. Peneliti yang dikukuhkan tersebut adalah Muhammad Mulyadi yang menjadi Profesor Riset ke-3 dari Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dan ke-519 secara nasional.

Pengukuhan profesor dilangsungkan dalam Sidang Majelis Profesor Riset yang dipimpin Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Bambang Subiyanto, turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan sejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, akademisi, dan undangan lain di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Dalam orasi ilmiahnya dengan judul "Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif", Profesor Mulyadi ia memaparkan, konsep modal sosial merupakan salah satu konsep yang belum terlalu populer namun keberadaannya sudah cukup sering

didiskusikan. Seperti yang diketahui, selama ini, pembangunan dilakukan hanya menggunakan modal fisik yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

"Modal sosial di negara kita belum mendapatkan tempat prioritas pengembangan, padahal modal sosial merupakan landasan bagi tumbuhnya kepercayaan dan kerja sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi karena mungkin pemahaman istilah konsep modal sosial belum dipahami dengan baik oleh kalangan para pengambil keputusan di tingkat desa sampai dengan nasional," ungkap Mulyadi.

Mulyadi yang memulai karirnya sebagai peneliti pada DPR RI sejak tahun 2009 ini memaparkan, modal sosial yang menjadi salah satu potensi yang ada di masyarakat tersebut harus terus dikembangkan. Menurutnya, modal sosial akan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sebab hubungan sosial yang terjadi di dalamnya berdampak pada berkembangnya *trust*, jaringan kerja sama dan norma-norma

yang ada di masyarakat.

"Oleh karena itu dalam konteks masalah pembangunan, dapat diatasi dengan mengembangkan modal sosial sebagai suatu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang pada masa sebelumnya abai atau bahkan mulai hilang dan tergerus. Ini penting, bukan hanya dalam konteks pembangunan tapi jauh lebih dari itu," jelas peneliti yang telah menghasilkan 45 karya tulis ilmiah itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut memberikan sambutan. Ia menyampaikan dalam rangka menghadirkan praktik pemerintahan demokratis dalam skema *check and balances* antara lembaga negara terus dilakukan. Hal ini sebagai suatu upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang demokratis, berkualitas, berimbang, sekaligus berimplikasi pada terjaminnya kepentingan rakyat.

Lebih lanjut dirinya turut memberikan apresiasi dan senantiasa mendukung semua bentuk penelitian serta riset-riset para peneliti di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas *supporting* dewan ke depannya. Melalui pengukuhan ini, Indra berharap dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk terus berkarya menjadi profesor riset.

"Secara khusus saya berpesan kepada seluruh peneliti, tingkatkanlah kompetensi, jadilah peneliti yang profesional, netral, rasional, demokratis, inovatif, mandiri, memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika administrasi publik, dalam memberikan dukungan kepada anggota dewan. Jangan biarkan hasil penelitian menumpuk tanpa memberikan nilai kebermanfaatannya," pesan Indra. ■ tra/es

BURT DPR Apresiasi Pelayanan Kesehatan RS AL Dr. Ramelan Surabaya

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing, mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Angkatan Laut (RS AL) Dr. Ramelan, Surabaya, Jawa Timur, kepada pasiennya. Anthon juga menyatakan, peran PT. Jasindo sebagai operator layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) juga sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI.

“(Fasilitasnya) Sangat bagus dan positif. Makanya kita minta Jasindo dapat meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut ini,” kata Anthon se usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan jajaran Pejabat dan Manajemen RS AL Dr. Ramelan, di Surabaya, Jatim, Jumat (21/6). Dalam kesempatan itu, Tim Kunker BURT DPR RI juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana RS AL Dr. Ramelan, Surabaya.

Selain itu, Anthon menilai fasilitas serta sarana dan prasarana RS AL Dr. Ramelan sudah menggunakan peralatan medis yang modern. Di samping itu, menurut Anthon, faktor pendukung lainnya yang membuat pelayanan kesehatan RS AL Dr. Ramelan sangat baik, dari hasil pemantauan, Sumber Daya Manusia (SDM) RS AL Dr. Ramelan memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan bertanggung jawab.

“Di rumah sakit ini saya rasa juga sudah termasuk (memiliki) peralatan yang modern. Di samping itu juga, disiplin (SDM) semua itu bisa berjalan dengan baik, apalagi Angkatan Laut tenaga ahlinya bagus,” puji legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada diungkapkan Anggota BURT DPR RI Indah Kurnia. Ia mengatakan, fasilitas RS AL Dr. Ramelan sangat lengkap, mulai dari adanya *helipad*, penataan ruang-ruang pelayanan kesehatan yang baik, SDM yang berkualitas, dan

satu-satunya RS yang memiliki pelayanan *Chamber Hiperbarik* (terapi oksigen) di Surabaya.

“Fasilitasnya sangat lengkap dan peralatan juga lengkap. Tapi yang terutama adalah SDM mereka sudah dengan tekad memberikan layanan yang terbaik. Masih banyak tempat-tempat yang penuh dengan udara udara yang segar. Dan satu lagi, ada layanan *Chamber Hiperbarik* bagi orang-orang yang memerlukan pelayanan itu,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Wakabin RS Al Dr. Ramelan Tjatur Bagus Gunarto mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ke depannya pihaknya berencana untuk membangun beberapa sarana dan prasarana, seperti membangun gedung bedah sentral, pelayanan onkologi terpadu atau *oncology center*, dan gedung 5 lantai khusus untuk anggota TNI dan keluarganya.

■ qq/sf



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing dan Anggota BURT foto bersama jajaran Pejabat dan Manajemen RS AL Dr. Ramelan, di Surabaya. Foto: Rizki/OD



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Soepriyatno dengan jajaran OJK dan AJB Bumiputera 1912 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/6). Foto: Sofyan/Od



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR dengan jajaran OJK dan AJB Bumiputera 1912 di Medan, Sumatera Utara (kiri) dan Makassar, Sulawesi Selatan (kanan), Kamis (20/6). Foto: Rizka, Erlangga/Od



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti meninjau fasilitas RS Kasih Ibu Denpasar di Bali, Selasa (25/6). Foto: Eka/Od